

Dinamika Kapasitas Fiskal dan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025

Astriani¹, Mediaty², Agus Bandang³

Program Studi Magister Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin
Makassar

Korespondensi: astrianirey@gmail.com

Diterima: 03-10-2026 | Disetujui: 08-10-2026 | Diterbitkan: 17-10-2026

ABSTRACT

This study describes the dynamics of fiscal capacity and human development across the 24 regencies/cities of South Sulawesi Province during 2021–2025. A quantitative-descriptive approach was applied to secondary data on realized local own-source revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), local government expenditure, and the Human Development Index (HDI), comprising 120 observations. Growth rates, compound annual growth rates, fiscal structure ratios, and coefficients of variation were used. Aggregate PAD rose from IDR 4.34 trillion in 2021 to IDR 7.20 trillion in 2025 (65.75% growth; CAGR 13.46%), faster than DAU (CAGR 5.05%) and local expenditure (CAGR 2.06%), while DAK fell by 8.28%, mainly because physical DAK shrank in 2025. The share of PAD in local expenditure increased from 13.58% to 20.74%, yet DAU still financed more than half of expenditure (52.59% in 2025). Makassar City contributed about 27% of aggregate PAD, and inter-regional PAD disparity remained wide (coefficient of variation 117.6%–132.3%). The mean HDI increased from 72.58 to 75.23, and all regions were in the high or very high category in 2025; regions with lower HDI improved faster, narrowing disparity (coefficient of variation 5.21% to 4.57%). These findings are descriptive and do not imply causal relationships between fiscal variables and HDI.

Keywords: *fiscal capacity; local own-source revenue; intergovernmental transfers; local expenditure; human development index; South Sulawesi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika kapasitas fiskal daerah dan pembangunan manusia di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan data sekunder realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 120 observasi. Analisis dilakukan melalui laju pertumbuhan, laju pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate*/CAGR), rasio struktur fiskal, dan koefisien variasi. Hasil menunjukkan bahwa PAD agregat meningkat dari Rp4,34 triliun pada 2021 menjadi Rp7,20 triliun pada 2025 (tumbuh 65,75%; CAGR 13,46%), lebih cepat daripada DAU (CAGR 5,05%) dan belanja daerah (CAGR 2,06%), sedangkan DAK menurun 8,28% terutama karena menyusutnya DAK fisik pada 2025. Porsi PAD terhadap belanja daerah naik dari 13,58% menjadi 20,74%, tetapi DAU masih menopang lebih dari separuh belanja (52,59% pada 2025).

Kota Makassar menyumbang sekitar 27% PAD agregat dan kesenjangan PAD antardaerah tetap lebar (koefisien variasi 117,6%–132,3%). Rata-rata IPM naik dari 72,58 menjadi 75,23 dan seluruh daerah berada pada kategori tinggi atau sangat tinggi pada 2025; daerah ber-IPM rendah tumbuh lebih cepat sehingga disparitas menyempit (koefisien variasi 5,21% menjadi 4,57%). Temuan ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara variabel fiskal dan IPM.

Kata kunci: kapasitas fiskal; pendapatan asli daerah; transfer ke daerah; belanja daerah; indeks pembangunan manusia; Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan tujuan akhir dari berbagai kebijakan pembangunan karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak penduduk. Di Indonesia, capaian tersebut diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan umur harapan hidup, pengetahuan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2022; Nashshar & Mulyana, 2022). Karena layanan dasar pendidikan dan kesehatan banyak diselenggarakan pemerintah daerah, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu konteks penting untuk membaca capaian IPM kabupaten/kota.

Literatur internasional telah banyak menelaah kaitan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia. Hung & Thanh (2022) mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia, sementara Jin & Jakovljevic (2023) menelaah desentralisasi fiskal dan IPM lintas negara. Studi lain menyoroti peran belanja publik, misalnya belanja kesehatan dalam kaitannya dengan pembangunan manusia dan desentralisasi (Miranda-Lescano et al., 2023), kesehatan masyarakat di Tiongkok (Xu & Lin, 2022), serta pergeseran preferensi belanja kesejahteraan penduduk (Wang et al., 2022). Dougherty et al. (2022) bahkan menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi dengan kinerja sistem kesehatan bersifat non-linier, sehingga dampak desentralisasi tidak dapat diasumsikan seragam, dan Jin & Rider (2022) membandingkan kaitan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan India.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dijalankan melalui kombinasi sumber penerimaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Khairi (2021) mengingatkan perlunya keseimbangan antara pelimpahan kewenangan dan penyerahan sumber penerimaan daerah, dan Saputra & Setiawan (2021) mengaitkan desentralisasi fiskal dengan akuntabilitas dan indikasi korupsi di daerah. Penataan hubungan keuangan pusat-daerah kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2022). Pada tataran praktik, tata kelola DAK masih menghadapi persoalan penyerapan dan efektivitas pemanfaatan (Nashshar & Mulyana, 2022).

Sejumlah studi di Indonesia menguji kaitan PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah dengan IPM, dengan hasil yang beragam. Nashshar dan Mulyana (2022) pada 497 kabupaten/kota melaporkan bahwa DAK berpengaruh negatif langsung terhadap IPM tetapi berpengaruh positif tidak langsung melalui belanja modal. Kurniasari & Kurnia (2021) menguji PAD dan dana perimbangan terhadap IPM dengan belanja modal sebagai variabel intervening, Fitriya & Witono (2023) serta Arifin & Setiawati (2023) mengkaji PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM, dan Putri & Ribawati (2025) melaporkan pengaruh positif pajak daerah dan pengaruh negatif kemiskinan terhadap IPM. Studi lain mengkaji PAD dan dana bagi hasil (Karampuan et al., 2023), PAD dan kemiskinan (Asyifa & Chandriyanti, 2025), DAK bidang pendidikan (Pambudi et al., 2021), serta kebijakan fiskal dan kesejahteraan (Nawawi et al., 2021; Pradana & Mun'im, 2022). Ketimpangan capaian antardaerah juga menjadi perhatian, misalnya dalam kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Arkum & Amar, 2022). Pada umumnya studi-studi tersebut bersifat inferensial dan berfokus pada satu atau beberapa variabel, sedangkan potret deskriptif terpadu yang memuat PAD, DAU, DAK, belanja daerah, dan IPM dalam satu kerangka waktu terbaru masih relatif terbatas.

Dinamika Kapasitas Fiskal dan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025

(Astriani, et al.)

Provinsi Sulawesi Selatan menarik untuk dipotret karena terdiri atas 24 kabupaten/kota dengan karakteristik fiskal yang sangat berbeda, mulai dari Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dengan basis PAD yang besar hingga kabupaten dengan PAD relatif kecil. Periode 2021–2025 juga mencakup fase pemulihan pascapandemi dan masa berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan perkembangan PAD sebagai cerminan kapasitas fiskal daerah; (2) menggambarkan struktur dan perkembangan DAU dan DAK; (3) menggambarkan perkembangan belanja daerah dalam kaitannya dengan sumber penerimaan; (4) menggambarkan perkembangan IPM; dan (5) memaparkan keterkaitan antarvariabel tersebut secara deskriptif. Penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel fiskal terhadap IPM; pengujian demikian memerlukan analisis inferensial yang berada di luar cakupan artikel ini.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif menggunakan data sekunder. Data numerik diolah menjadi tabel, rasio, persentase pertumbuhan, dan grafik untuk menggambarkan kondisi dan perubahan antarwaktu dan antardaerah. Penelitian ini tidak menggunakan regresi maupun pengujian hipotesis.

2.2 Objek, periode, dan sumber data

Objek penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni 24 daerah (21 kabupaten dan 3 kota), selama 2021–2025, sehingga diperoleh 120 observasi ($24 \text{ daerah} \times 5 \text{ tahun}$). Variabel yang digunakan adalah realisasi PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah dalam rupiah nominal, serta IPM dalam satuan poin. Data fiskal bersumber dari portal data APBD dan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (DJPK, n.d.), sedangkan IPM bersumber dari rekapitulasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan (BPS, 2022). Realisasi DAU dan DAK diambil dari Postur TKDD; DAK merupakan penjumlahan DAK fisik dan DAK nonfisik dan tidak mencakup Dana Insentif Daerah. Nilai ditampilkan dalam miliar atau triliun rupiah, dan tidak disesuaikan dengan inflasi.

2.3 Teknik analisis data

Analisis dilakukan pada dua tingkat, yaitu agregat provinsi (penjumlahan 24 daerah, kecuali IPM yang dirata-rata) dan per kabupaten/kota. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. **Laju pertumbuhan tahunan** variabel X pada tahun t :

$$\text{Pertumbuhan}_t (\%) = [(X_t - X_{t-1}) / X_{t-1}] \times 100$$

2. **Laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR)** periode 2021–2025 (empat interval tahun):

$$\text{CAGR} (\%) = [(X_{2025} / X_{2021})^{1/4} - 1] \times 100$$

3. **Rasio struktur fiskal**, yaitu PAD/Belanja, DAU/Belanja, dan DAK/Belanja (dalam persen), serta porsi PAD terhadap jumlah PAD, DAU, dan DAK. Rasio PAD/Belanja digunakan sebagai gambaran sejauh mana belanja daerah dibiayai dari sumber penerimaan sendiri.
4. **Koefisien variasi (CV)** = simpangan baku / rata-rata $\times 100\%$, untuk menggambarkan disparitas antardaerah pada PAD dan IPM setiap tahun.
5. **Klasifikasi IPM** menurut kategori BPS (sangat tinggi ≥ 80 ; tinggi $70 < 80$; sedang $60 < 70$; rendah < 60) (Nashshar & Mulyana, 2022).

Dinamika Kapasitas Fiskal dan Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025

(Astriani, et al.)

Keterkaitan antarvariabel dipaparkan secara deskriptif dengan menyandingkan arah perubahan PAD, DAU, DAK, belanja, dan IPM serta peringkat antardaerah. Tidak dilakukan perhitungan koefisien pengaruh atau uji signifikansi.

2.4 Kerangka analisis

Kerangka analisis bersifat naratif: sumber penerimaan daerah (PAD, DAU, DAK) dibaca bersama dengan realisasi belanja daerah, kemudian disandingkan dengan capaian IPM. PAD dipandang sebagai cerminan kapasitas fiskal, DAU sebagai transfer umum untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal, dan DAK sebagai transfer khusus untuk kegiatan prioritas nasional (Nashshar & Mulyana, 2022). Hubungan antarvariabel hanya dipaparkan sebagai pola yang teramati pada data, yaitu apakah variabel-variabel tersebut bergerak searah atau tidak pada periode yang sama, tanpa menguji arah kausalitas maupun signifikansi statistiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan PAD sebagai cerminan kapasitas fiskal daerah

Tabel 1 menyajikan perkembangan agregat variabel penelitian. PAD seluruh kabupaten/kota meningkat dari Rp4,34 triliun pada 2021 menjadi Rp7,20 triliun pada 2025. Tabel 2 menunjukkan bahwa kenaikan kumulatif tersebut mencapai 65,75% atau CAGR 13,46%, jauh melampaui DAU (CAGR 5,05%) maupun belanja daerah (CAGR 2,06%). Laju pertumbuhan tahunan PAD tidak merata: 12,66% pada 2022, melambat menjadi 2,29% pada 2023, kemudian mempercepat menjadi 16,87% pada 2024 dan 23,07% pada 2025. Percepatan pada 2024–2025 terjadi pada masa berlakunya penataan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022); namun, data penelitian ini tidak memuat rincian jenis PAD sehingga kontribusi kebijakan tersebut tidak dapat dipastikan.

Tabel 1. Perkembangan agregat PAD, DAU, DAK, belanja daerah (triliun rupiah), dan rata-rata IPM kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 2021–2025

Tahun	PAD	DAU	DAK	Belanja daerah	Rata-rata IPM
2021	4,34	14,99	6,08	31,99	72,58
2022	4,89	15,00	6,97	33,92	73,13
2023	5,01	15,98	6,50	32,46	73,84
2024	5,85	17,29	6,72	36,01	74,49
2025	7,20	18,25	5,58	34,71	75,23

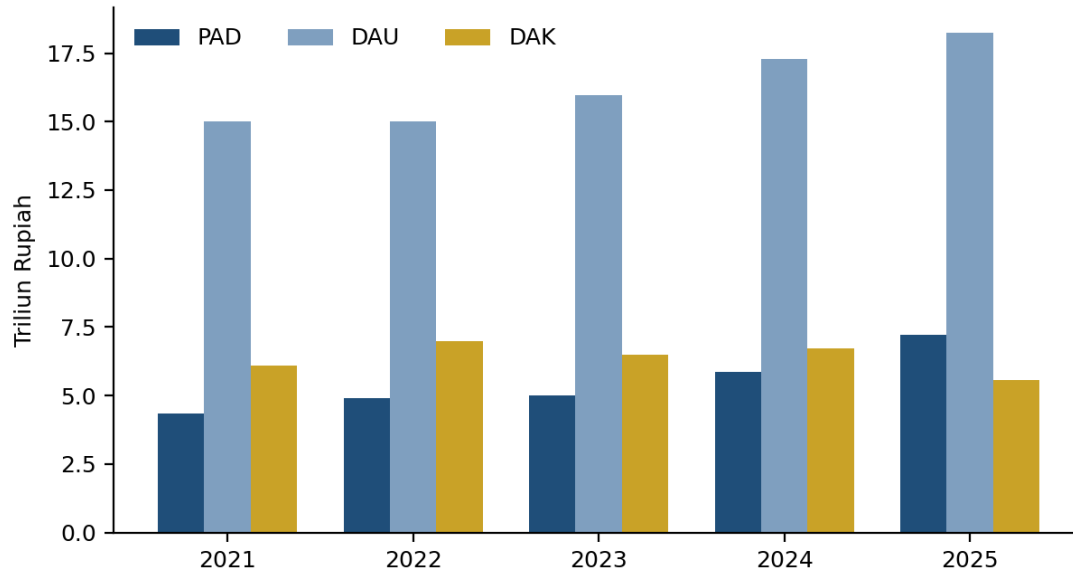
Sumber: DJPK dan BPS, diolah penulis.

Tabel 2. Laju pertumbuhan tahunan, kumulatif, dan CAGR variabel agregat (%)

Periode	PAD	DAU	DAK	Belanja daerah	IPM
2022	12,66	0,04	14,62	6,02	0,76
2023	2,29	6,56	-6,77	-4,29	0,98
2024	16,87	8,18	3,40	10,94	0,87
2025	23,07	5,59	-16,99	-3,61	1,00
2021–2025 (kumulatif)	65,75	21,76	-8,28	8,51	3,66

Periode	PAD	DAU	DAK	Belanja daerah	IPM
CAGR tahunan	13,46	5,05	-2,14	2,06	0,90

Sumber: DJPK dan BPS, diolah penulis. Pertumbuhan IPM dihitung dari rata-rata IPM 24 daerah.



Gambar 1. PAD, DAU, dan DAK agregat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 2021–2025

Struktur PAD antardaerah sangat timpang (Tabel 3). Kota Makassar menyumbang 26,25% PAD agregat pada 2021 dan 26,98% pada 2025, dengan puncak 29,05% pada 2023; rata-rata PAD Makassar sebesar Rp1.510,6 miliar per tahun, jauh di atas Luwu Timur (Rp378,2 miliar), Gowa (Rp295,6 miliar), Maros (Rp291,7 miliar), dan Bone (Rp253,5 miliar). Sebaliknya, PAD rata-rata terendah terdapat di Toraja Utara (Rp50,8 miliar), Kepulauan Selayar (Rp73,1 miliar), dan Enrekang (Rp79,6 miliar). Tanpa Makassar, PAD 23 daerah lainnya tetap tumbuh 64,10% (dari Rp3.203,5 miliar menjadi Rp5.257,1 miliar), sehingga kenaikan PAD agregat tidak semata-mata digerakkan oleh satu daerah. Disparitas, yang diukur dengan koefisien variasi, bergerak dari 117,6% (2021) ke puncak 132,3% (2023) dan turun menjadi 121,8% (2025), sementara rasio PAD tertinggi terhadap terendah berubah dari 25,1 kali menjadi 26,8 kali.

Pertumbuhan kumulatif PAD tertinggi tercatat di Bone (106,32%; CAGR 19,85%), Kota Parepare (90,59%), Kepulauan Selayar (89,48%), Bantaeng (84,64%), dan Jeneponto (84,62%). Pertumbuhan terendah terdapat di Luwu Utara (2,63%; CAGR 0,65%), Sinjai (27,21%), dan Enrekang (29,76%). Dinamika tahunan juga cukup fluktuatif: dari 96 pasangan pertumbuhan tahunan antardaerah, 16 di antaranya bernilai negatif. Kasus paling ekstrem adalah Takalar, yang PAD-nya turun 52,0% pada 2023 (Rp47,55 miliar) lalu melonjak 206,8% pada 2024 (Rp145,87 miliar). Rincian Postur APBD pada portal DJPK menunjukkan bahwa lonjakan tersebut hampir seluruhnya berasal dari komponen “Lain-lain PAD yang Sah”, yang naik dari sekitar Rp7,5 miliar menjadi sekitar Rp89,9 miliar (realisasi s.d. Oktober), sedangkan pajak daerah (sekitar Rp21 miliar) dan retribusi daerah (sekitar Rp1,6–1,8 miliar) nyaris tidak berubah (DJPK, n.d.). Pola ini lebih mencerminkan pergeseran pencatatan atau klasifikasi penerimaan daripada kenaikan penerimaan yang riil, dan realisasi PAD Takalar 2023 juga tergolong rendah terhadap

pagunya. Sebagai uji kepekaan, tanpa Takalar PAD 23 daerah lainnya tumbuh 66,40% (CAGR 13,58%) selama 2021–2025, dengan pertumbuhan tahunan 13,57% (2022), 3,41% (2023), 15,05% (2024), dan 23,15% (2025); angka-angka ini nyaris sama dengan hasil agregat 24 daerah sehingga pola umum PAD tidak bergantung pada Takalar. Namun, laju PAD Takalar sendiri perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

Tabel 3. PAD kabupaten/kota (miliar rupiah) dan rasio PAD terhadap belanja daerah, diurutkan menurut rata-rata PAD 2021–2025

Kabupaten/Kota	PAD 2021	PAD 2025	Pertumb. kumulatif (%)	CAGR (%)	Rata-rata PAD	PAD/Belanja 2025 (%)
Makassar (Kota)	1.140,3	1.942,6	70,36	14,25	1.510,6	45,1
Luwu Timur	305,9	482,9	57,85	12,09	378,2	25,4
Gowa	260,9	423,8	62,43	12,89	295,6	20,4
Maros	221,5	357,3	61,33	12,70	291,7	23,3
Bone	177,4	366,1	106,32	19,85	253,5	14,9
Parepare (Kota)	162,9	310,5	90,59	17,50	212,1	34,7
Pangkajene dan Kepulauan	159,4	279,9	75,58	15,11	199,7	18,7
Palopo (Kota)	140,1	253,2	80,66	15,94	188,8	27,1
Bulukumba	153,2	254,6	66,14	13,53	186,5	16,2
Bantaeng	121,6	224,6	84,64	16,57	185,3	22,7
Wajo	150,1	256,3	70,79	14,32	178,0	16,7
Sidenreng Rappang	136,8	237,3	73,44	14,76	173,3	18,8
Luwu	132,5	237,1	79,00	15,67	172,8	15,8
Pinrang	134,1	228,0	70,08	14,20	171,8	15,7
Soppeng	155,5	210,2	35,23	7,84	168,1	21,2
Jeneponto	99,1	183,0	84,62	16,57	126,4	14,3
Tana Toraja	87,9	133,9	52,41	11,11	124,5	12,0
Takalar	121,9	174,5	43,14	9,38	117,8	16,1
Luwu Utara	122,3	125,5	2,63	0,65	111,4	9,3
Barru	91,1	124,9	37,13	8,21	105,6	14,0
Sinjai	95,6	121,6	27,21	6,20	103,5	11,5
Enrekang	73,3	95,1	29,76	6,73	79,6	9,7
Kepulauan Selayar	55,0	104,1	89,48	17,33	73,1	11,0
Toraja Utara	45,5	72,6	59,74	12,42	50,8	6,7

Sumber: DJPK, diolah penulis.

Dari sisi kemandirian pembiayaan, rasio PAD terhadap belanja daerah agregat meningkat dari 13,58% (2021) menjadi 20,74% (2025) (Tabel 4). Pada 2025, rasio tertinggi dicapai Kota Makassar (45,1%), Kota Parepare (34,7%), Kota Palopo (27,1%), dan Luwu Timur (25,4%), sedangkan terendah di Toraja Utara (6,7%), Luwu Utara (9,3%), dan Enrekang (9,7%). Dengan demikian, meskipun kapasitas fiskal secara agregat membaik, mayoritas daerah masih membiayai sebagian besar belanjanya dari sumber di luar PAD.

3.2 Struktur dan perkembangan transfer fiskal (DAU dan DAK)

DAU agregat naik dari Rp14,99 triliun (2021) menjadi Rp18,25 triliun (2025), atau 21,76%. Pertumbuhannya hampir nol pada 2022 (0,04%), kemudian 6,56% (2023), 8,18% (2024), dan 5,59% (2025). Seluruh 24 daerah mengalami kenaikan DAU selama periode penelitian, dengan kisaran 6,59% (Kepulauan Selayar) hingga 41,77% (Gowa); kenaikan besar juga terjadi di Makassar (40,27%) dan Bone (36,91%), sedangkan yang terkecil di Kepulauan Selayar, Palopo (9,18%), dan Barru (9,32%). Catatan dalam data sumber menyebutkan bahwa DAU 2025 sudah mencakup transfer dukungan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 guru, sehingga sebagian kenaikan pada tahun tersebut bersifat penugasan khusus.

Berbeda dengan DAU, DAK agregat turun dari Rp6,08 triliun menjadi Rp5,58 triliun (-8,28%), dengan pola naik-turun: +14,62% (2022), -6,77% (2023), +3,40% (2024), dan -16,99% (2025). Dari 24 daerah, 18 mengalami penurunan DAK antara 2021 dan 2025, dengan penurunan terdalam di Sinjai (-44,12%), Bantaeng (-37,25%), Sidenreng Rappang (-36,95%), Soppeng (-36,28%), dan Palopo (-35,30%). Hanya enam daerah yang DAK-nya naik, yaitu Makassar (+73,94%), Pangkajene dan Kepulauan (+23,42%), Bulukumba (+14,54%), Maros (+13,80%), Pinrang (+10,32%), dan Toraja Utara (+1,63%).

Tabel 4. Struktur fiskal agregat: rasio terhadap belanja daerah dan porsi PAD (%)

Tahun	PAD/ Belanja	DAU/ Belanja	DAK/ Belanja	(PAD+DAU+DAK)/ Belanja	PAD/ (PAD+DAU+DAK)
2021	13,58	46,87	19,02	79,46	17,09
2022	14,43	44,22	20,56	79,21	18,22
2023	15,42	49,23	20,02	84,68	18,21
2024	16,25	48,01	18,66	82,92	19,59
2025	20,74	52,59	16,07	89,41	23,20

Sumber: DJPK, diolah penulis.

Rincian DAK pada Tabel 5 menjelaskan sumber penurunan tersebut. DAK fisik anjlok dari Rp2,90 triliun (2021) menjadi Rp0,66 triliun (2025), yakni turun 77,19%, termasuk penurunan 71,11% hanya pada 2025, sehingga porsinya terhadap total DAK menyusut dari 47,7% menjadi 11,9%. Sebaliknya, DAK nonfisik naik 54,51% dari Rp3,18 triliun menjadi Rp4,92 triliun. Perubahan komposisi ini berarti bahwa penurunan DAK pada 2025 terutama terjadi pada komponen yang membiayai pembangunan fisik, sedangkan komponen layanan nonfisik justru menguat. Latar belakang kebijakan perubahan ini tidak dapat ditelusuri dari data yang dianalisis dan perlu dikaji pada ketentuan rincian TKDD tahun bersangkutan.

Tabel 5. Komposisi DAK fisik dan nonfisik agregat (triliun rupiah)

Tahun	DAK fisik	DAK nonfisik	Total DAK	Porsi DAK fisik (%)
2021	2,90	3,18	6,08	47,7
2022	2,93	4,05	6,97	42,0
2023	2,00	4,50	6,50	30,8
2024	2,29	4,43	6,72	34,1
2025	0,66	4,92	5,58	11,9

Sumber: *Postur TKDD DJPK, diolah penulis.*

Ketergantungan terhadap DAU tampak jelas pada struktur belanja (Tabel 6). Secara agregat, DAU membiayai setara 52,59% belanja daerah pada 2025, naik dari 46,87% pada 2021. Pada tingkat daerah, rasio DAU terhadap belanja tahun 2025 berkisar dari 30,6% (Luwu Timur) hingga 67,0% (Soppeng), dengan rata-rata sekitar 54,6%. Daerah dengan PAD besar seperti Makassar (DAU/belanja rata-rata 37,3%) dan Luwu Timur (31,0%) relatif tidak bergantung pada DAU, sedangkan Kepulauan Selayar (59,2%), Barru (56,0%), dan Palopo (54,4%) berada pada ujung yang lebih tergantung.

Tabel 6. Rata-rata DAU dan DAK (miliar rupiah), pertumbuhan 2021–2025, dan rasio terhadap belanja daerah (rata-rata 2021–2025)

Kabupaten/Kota	DAU rata-rata	Pertumb. DAU (%)	DAK rata-rata	Pertumb. DAK (%)	DAU/ Belanja (%)	DAK/ Belanja (%)
Makassar (Kota)	1.456,3	40,27	454,9	73,94	37,3	11,7
Bone	1.133,6	36,91	497,1	-0,86	46,6	20,4
Gowa	922,1	41,77	406,2	-14,35	47,2	20,8
Pangkajene dan Kepulauan	746,5	16,55	296,9	23,42	52,1	20,7
Bulukumba	728,4	28,04	333,7	14,54	49,5	22,7
Wajo	720,6	20,06	332,6	-20,36	48,6	22,4
Maros	719,1	23,99	276,3	13,80	49,0	18,8
Pinrang	715,4	21,09	280,6	10,32	52,4	20,5
Luwu	702,8	19,00	298,4	-11,89	47,4	20,1
Luwu Utara	674,1	21,41	228,1	-4,72	51,7	17,5
Jeneponto	648,6	14,53	249,3	-22,68	53,4	20,5
Sidenreng Rappang	622,9	21,15	238,3	-36,95	52,2	20,0
Soppeng	612,4	14,41	248,0	-36,28	53,0	21,5
Takalar	601,5	18,03	227,7	-11,65	51,1	19,3
Kepulauan Selayar	582,8	6,59	183,0	-19,72	59,2	18,6
Sinjai	577,3	16,65	277,7	-44,12	52,5	25,2
Tana Toraja	570,7	13,40	236,7	-0,36	50,7	21,0

Kabupaten/Kota	DAU rata-rata	Pertumb. DAU (%)	DAK rata-rata	Pertumb. DAK (%)	DAU/ Belanja (%)	DAK/ Belanja (%)
Toraja Utara	543,7	21,64	234,8	1,63	52,7	22,8
Luwu Timur	542,5	16,11	194,7	-3,51	31,0	11,1
Enrekang	531,6	19,10	244,0	-18,46	48,9	22,5
Palopo (Kota)	506,9	9,18	154,8	-35,30	54,4	16,6
Barru	502,3	9,32	158,0	-4,77	56,0	17,6
Bantaeng	491,1	11,94	192,5	-37,25	49,7	19,5
Parepare (Kota)	449,9	10,52	126,6	-15,67	50,9	14,3

Sumber: Postur TKDD DJPK, diolah penulis. Pertumbuhan dihitung 2025 terhadap 2021.

3.3 Perkembangan belanja daerah

Belanja daerah agregat naik dari Rp31,99 triliun (2021) menjadi Rp34,71 triliun (2025), atau 8,51% (CAGR 2,06%). Pertumbuhan tahunannya bergelombang: +6,02% (2022), -4,29% (2023), +10,94% (2024), dan -3,61% (2025). Dibandingkan dengan sumber penerimaan, jumlah PAD, DAU, dan DAK setara 79,46% belanja pada 2021 dan 89,41% pada 2025 (Tabel 4), yang berarti peranan ketiga sumber ini dalam membiayai belanja semakin besar seiring melambatnya kenaikan belanja. Pada 2025 terlihat pola yang menarik: PAD tumbuh 23,07% dan DAU 5,59%, tetapi DAK turun 16,99% dan belanja turun 3,61%. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan penerimaan sendiri tidak serta-merta tercermin pada belanja tahun yang sama, dan bahwa penurunan DAK (terutama DAK fisik) ikut membentuk dinamika belanja; keterkaitan tersebut hanya dapat dipastikan jika komposisi belanja (misalnya belanja modal) tersedia.

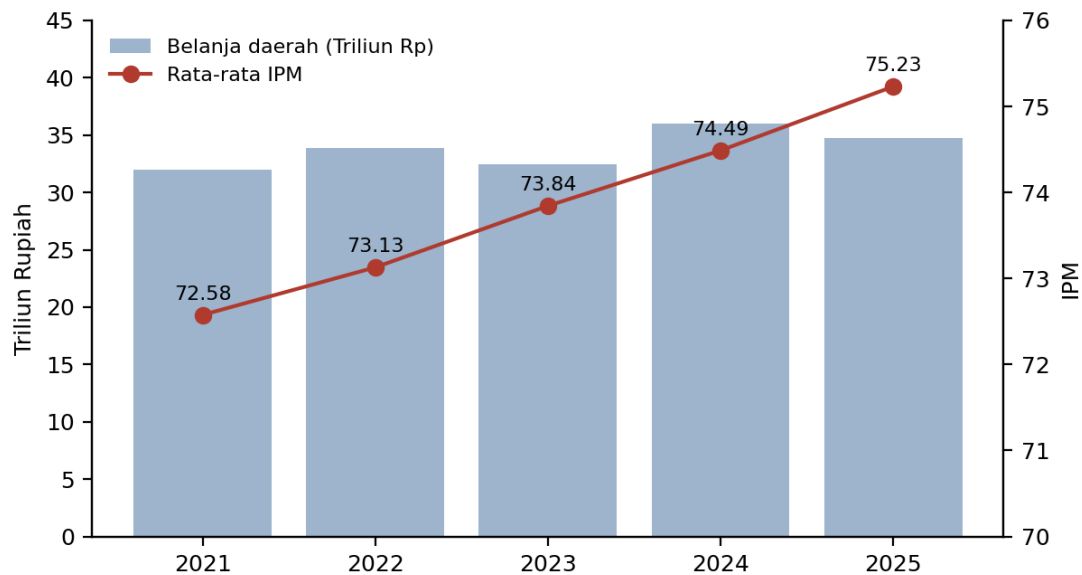
Pada tingkat daerah (Tabel 7), belanja 2025 lebih rendah daripada 2021 di enam daerah, yaitu Sinjai (-12,31%), Enrekang (-12,03%), Soppeng (-11,24%), Kepulauan Selayar (-7,68%), Takalar (-3,69%), dan Palopo (-0,21%). Pertumbuhan belanja tertinggi dicatat Makassar (+36,78%), Luwu Timur (+26,69%), Bulukumba (+16,28%), dan Gowa (+15,15%). Porsi Makassar dalam belanja agregat naik dari 9,85% menjadi 12,41%, lebih rendah daripada porsinya dalam PAD (sekitar 27%), karena belanja daerah-daerah lain ditopang oleh transfer yang lebih besar.

Tabel 7. Belanja daerah kabupaten/kota (miliar rupiah), 2021–2025

Kabupaten/Kota	Rata-rata 2021–2025	2021	2025	Pertumb. (%)
Makassar (Kota)	3.901,1	3.150,5	4.309,1	36,78
Bone	2.432,3	2.270,3	2.461,8	8,44
Gowa	1.953,3	1.804,8	2.078,2	15,15
Luwu Timur	1.751,5	1.502,7	1.903,7	26,69
Wajo	1.483,9	1.494,2	1.538,0	2,93
Luwu	1.483,8	1.404,0	1.499,8	6,83
Bulukumba	1.470,7	1.354,5	1.575,0	16,28
Maros	1.468,9	1.368,6	1.534,1	12,09

Kabupaten/Kota	Rata-rata 2021–2025	2021	2025	Pertumb. (%)
Pangkajene dan Kepulauan	1.432,0	1.340,1	1.493,2	11,43
Pinrang	1.366,3	1.293,8	1.455,7	12,51
Luwu Utara	1.304,1	1.267,7	1.351,7	6,63
Jeneponto	1.213,8	1.213,7	1.281,5	5,58
Sidenreng Rappang	1.194,0	1.199,2	1.261,3	5,18
Takalar	1.178,0	1.128,0	1.086,4	-3,69
Soppeng	1.154,7	1.115,0	989,7	-11,24
Tana Toraja	1.125,4	1.049,7	1.116,0	6,31
Sinjai	1.100,1	1.208,4	1.059,7	-12,31
Enrekang	1.087,0	1.114,7	980,5	-12,03
Toraja Utara	1.031,9	1.017,1	1.082,2	6,39
Bantaeng	987,6	962,8	988,0	2,62
Kepulauan Selayar	984,3	1.023,6	945,0	-7,68
Palopo (Kota)	932,6	935,5	933,6	-0,21
Barro	897,4	889,4	891,5	0,23
Parepare (Kota)	883,3	881,4	896,1	1,67

Sumber: DJPK, diolah penulis.



Gambar 2. Belanja daerah agregat dan rata-rata IPM kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 2021–2025

3.4 Perkembangan pembangunan manusia

Rata-rata IPM kabupaten/kota meningkat dari 72,58 (2021) menjadi 75,23 (2025), atau naik 2,65 poin (3,66%). Kenaikan terjadi setiap tahun, yaitu 0,55 poin (2022), 0,71 poin (2023), 0,65 poin (2024), dan 0,74 poin (2025); tidak ada satu pun daerah yang mencatat penurunan IPM dari tahun ke tahun. Pada 2021 hanya Makassar yang berkategori sangat tinggi (84,00) dan lima daerah masih berkategori sedang (IPM <70): Bantaeng, Bone, Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Tana Toraja. Pada 2025, tiga daerah berkategori sangat tinggi (Makassar 85,66; Palopo 81,74; Parepare 81,50) dan tidak ada lagi daerah berkategori sedang; IPM terendah (Jeneponto) naik dari 67,54 menjadi 70,25.

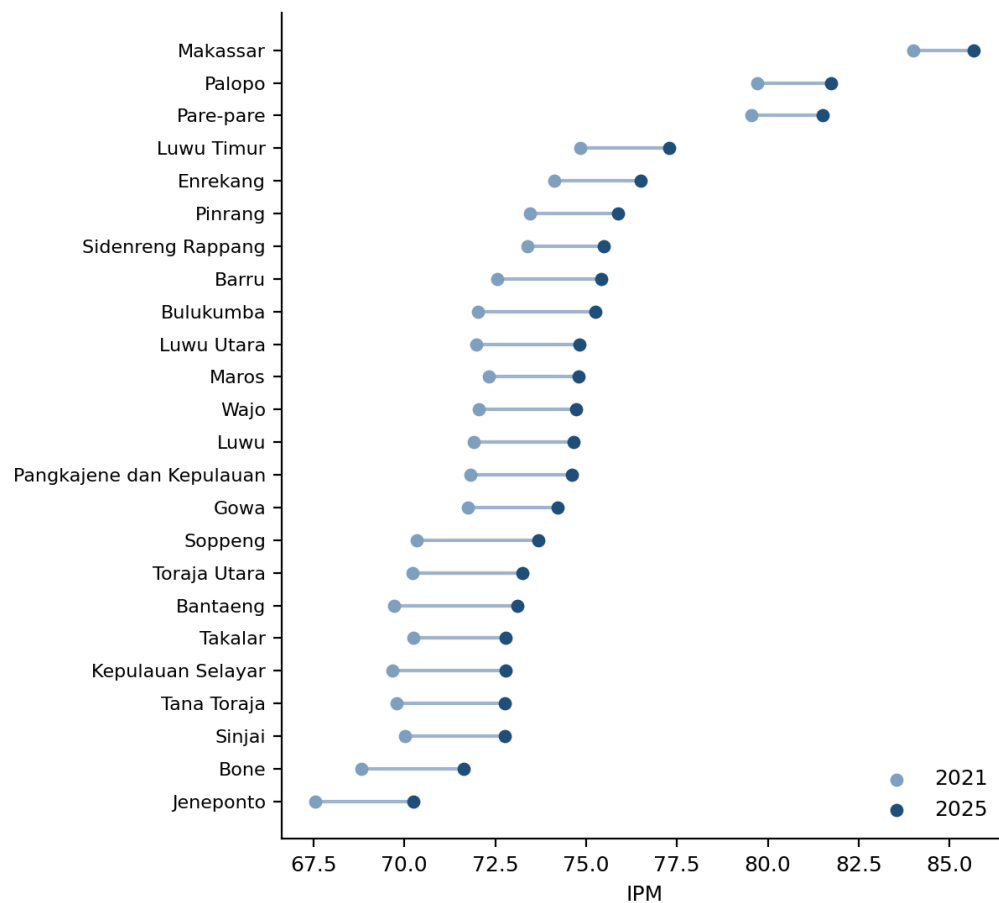
Peningkatan IPM paling besar terjadi di daerah dengan titik awal lebih rendah, yaitu Bantaeng (+3,41 poin), Soppeng (+3,36), Bulukumba (+3,24), dan Kepulauan Selayar (+3,10), sedangkan kenaikan terkecil di Makassar (+1,66), Parepare (+1,94), dan Palopo (+2,02), daerah yang sudah berada pada IPM tinggi. Akibatnya, disparitas menyempit: simpangan baku IPM turun dari 3,78 menjadi 3,44, koefisien variasi dari 5,21% menjadi 4,57%, dan rentang antara IPM tertinggi dan terendah dari 16,46 menjadi 15,41 poin. Pola ini sejalan dengan gambaran konvergensi capaian pembangunan manusia, meskipun jarak antara kota-kota besar dan kabupaten dengan IPM terendah masih lebar. Rata-rata IPM periode 2021–2025 tertinggi tercatat di Makassar (84,84), Palopo (80,74), dan Parepare (80,45), serta terendah di Jeneponto (68,86), Bone (70,19), dan Tana Toraja (71,13).

Tabel 8. IPM kabupaten/kota, perubahan 2021–2025, kategori, dan peringkat PAD rata-rata

Kabupaten/Kota	IPM 2021	IPM 2025	Perubahan (poin)	Rata-rata IPM	Kategori (2021 → 2025)	Peringkat PAD
Makassar (Kota)	84,00	85,66	1,66	84,84	Sangat tinggi	1
Palopo (Kota)	79,72	81,74	2,02	80,74	Tinggi → Sangat tinggi	8
Parepare (Kota)	79,56	81,50	1,94	80,45	Tinggi → Sangat tinggi	6
Luwu Timur	74,83	77,28	2,45	75,96	Tinggi	2
Enrekang	74,13	76,50	2,37	75,24	Tinggi	22
Pinrang	73,46	75,87	2,41	74,67	Tinggi	14
Sidenreng Rappang	73,39	75,49	2,10	74,38	Tinggi	12
Barru	72,56	75,41	2,85	73,85	Tinggi	20
Bulukumba	72,02	75,26	3,24	73,62	Tinggi	9
Maros	72,32	74,79	2,47	73,53	Tinggi	4
Wajo	72,05	74,72	2,67	73,40	Tinggi	11
Luwu Utara	71,99	74,81	2,82	73,33	Tinggi	19
Luwu	71,92	74,66	2,74	73,22	Tinggi	13
Pangkajene dan Kepulauan	71,81	74,62	2,81	73,19	Tinggi	7
Gowa	71,74	74,22	2,48	73,02	Tinggi	3
Soppeng	70,33	73,69	3,36	71,95	Tinggi	15

Kabupaten/Kota	IPM 2021	IPM 2025	Perubahan (poin)	Rata-rata IPM	Kategori (2021 → 2025)	Peringkat PAD
Toraja Utara	70,22	73,24	3,02	71,66	Tinggi	24
Takalar	70,25	72,79	2,54	71,48	Tinggi	18
Bantaeng	69,71	73,12	3,41	71,34	Sedang → Tinggi	10
Sinjai	70,02	72,76	2,74	71,28	Tinggi	21
Kepulauan Selayar	69,68	72,78	3,10	71,17	Sedang → Tinggi	23
Tana Toraja	69,78	72,77	2,99	71,13	Sedang → Tinggi	17
Bone	68,81	71,63	2,82	70,19	Sedang → Tinggi	5
Jeneponto	67,54	70,25	2,71	68,86	Sedang → Tinggi	16

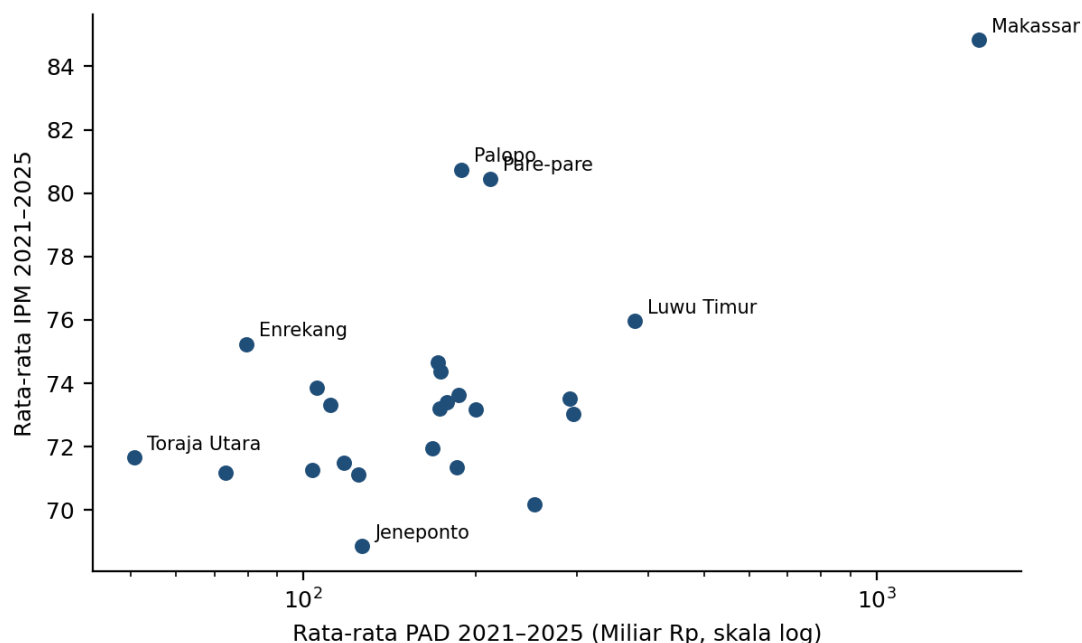
Sumber: BPS dan DJPK, diolah penulis. Kategori menurut klasifikasi BPS; peringkat PAD berdasarkan rata-rata PAD 2021–2025 (1 = tertinggi).



Gambar 3. IPM kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 2021 dan 2025

3.5 Keterkaitan deskriptif antara kapasitas fiskal, transfer, belanja, dan IPM

Pada tingkat agregat, peningkatan PAD (+65,75%) berlangsung bersamaan dengan peningkatan rata-rata IPM (+2,65 poin), dan kenaikan keduanya terjadi setiap tahun. Namun, penyandingan tahunan menunjukkan bahwa pergerakan kedua variabel tidak selalu searah dalam kecepatan: IPM tetap naik 0,71 poin pada 2023 ketika PAD hanya tumbuh 2,29% dan belanja turun 4,29%, dan IPM naik 0,74 poin pada 2025 ketika DAK turun 16,99% dan belanja turun 3,61%. Pola ini mengindikasikan bahwa perubahan IPM berlangsung stabil dan bertahap, sehingga tidak serta-merta mengikuti fluktuasi tahunan variabel fiskal. Hal ini juga sejalan dengan pengamatan Dougherty et al. (2022) bahwa hubungan desentralisasi dan kinerja layanan tidak bersifat sederhana. Dengan data deskriptif seperti ini, kebersamaan tren tidak dapat ditafsirkan sebagai pengaruh satu variabel terhadap variabel lain.



Gambar 4. Rata-rata PAD (skala logaritmik) dan rata-rata IPM kabupaten/kota, 2021–2025

Pada sisi antardaerah (Tabel 8 dan Gambar 4), daerah perkotaan seperti Makassar, Palopo, dan Parepare memiliki IPM tertinggi dan rasio PAD terhadap belanja yang relatif besar. Akan tetapi, peringkat PAD dan IPM tidak sepenuhnya sejalan. Gowa (peringkat PAD ke-3) dan Bone (ke-5) hanya berada pada peringkat IPM ke-15 dan ke-23. Di sisi lain, Enrekang yang PAD-nya berada di peringkat ke-22 memiliki IPM peringkat ke-5, dan Barru (PAD ke-20) berada pada peringkat IPM ke-8. Luwu Timur menunjukkan kombinasi PAD tinggi (peringkat 2) dan IPM relatif tinggi (peringkat 4). Keragaman pola ini menunjukkan bahwa besarnya PAD bukan satu-satunya penanda capaian IPM, dan bahwa faktor lain, seperti struktur ekonomi, jumlah penduduk, dan kondisi awal, kemungkinan turut berperan; faktor-faktor tersebut tidak tercakup dalam data penelitian ini.

Dari sudut kebijakan, dua hal layak dicatat. Pertama, mayoritas daerah dengan PAD kecil mengandalkan DAU untuk lebih dari separuh belanjanya, sementara DAK sebagai sumber pembiayaan layanan dasar spesifik berfluktuasi dan menyusut pada komponen fisik. Hal ini menegaskan pentingnya prediktabilitas transfer dan penyerapan DAK yang baik (Nashshar & Mulyana, 2022), serta pengelolaan keseimbangan antara kewenangan dan sumber penerimaan daerah (Khairi, 2021). Kedua, peningkatan PAD yang pesat sejak 2024 membuka ruang fiskal yang lebih besar, tetapi tetap perlu disertai tata kelola dan akuntabilitas yang memadai agar tambahan penerimaan benar-benar diarahkan pada layanan publik (Saputra & Setiawan, 2021). Apakah pola-pola di atas mencerminkan hubungan sebab-akibat atau sekadar kebetulan waktu merupakan pertanyaan empiris yang perlu dijawab melalui analisis data panel dengan pengendalian karakteristik antardaerah dan pertimbangan jeda waktu (*lag*), sebagaimana dilakukan pada studi-studi inferensial sebelumnya (Fitriya & Witono, 2023; Kurniasari & Kurnia, 2021; Nashshar & Mulyana, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas fiskal yang didekati melalui PAD mengalami peningkatan selama 2021–2025, meskipun masih terdapat ketimpangan yang tinggi antardaerah. DAU juga meningkat dan tetap menjadi sumber penting dalam pembiayaan belanja daerah, sedangkan DAK mengalami penurunan terutama akibat berkurangnya DAK fisik. Belanja daerah mengalami pertumbuhan yang relatif moderat dan berfluktuasi, sementara IPM meningkat secara konsisten di seluruh daerah serta diikuti oleh penurunan disparitas antardaerah. Secara deskriptif, peningkatan PAD dan IPM berlangsung secara bersamaan, tetapi pola tersebut belum dapat menunjukkan adanya pengaruh fiskal terhadap IPM.

4.2 Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan kapasitas fiskal antardaerah. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga perlu menjaga kesinambungan pembiayaan layanan dasar di tengah perubahan komposisi transfer, khususnya penurunan DAK fisik. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel sosial-ekonomi dan rincian belanja daerah serta menggunakan analisis data panel untuk menguji hubungan antara kapasitas fiskal, belanja daerah, dan IPM secara lebih mendalam.

4.3 Keterbatasan

Pertama, nilai fiskal dinyatakan dalam rupiah nominal tanpa penyesuaian inflasi sehingga pertumbuhan riil lebih rendah daripada pertumbuhan nominal. Kedua, belanja daerah merupakan total realisasi tanpa rincian jenis belanja. Ketiga, DAK tidak mencakup Dana Insentif Daerah, dan DAU 2025 memuat dukungan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 guru. Keempat, PAD sebagian daerah dipengaruhi pergeseran pencatatan antarkomponen (misalnya komponen “Lain-lain PAD yang Sah” di Takalar pada 2023–2024) sehingga laju pertumbuhannya perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Kelima, periode lima tahun relatif pendek untuk menilai perubahan indikator yang bergerak lambat seperti IPM. Keenam, karena bersifat deskriptif, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. A. N., & Setiawati, E. (2023). The effect of genuine revenue, general allocation funds and special allocation funds on the human development index. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(2), 53–59.
- Arkum, D., & Amar, H. (2022). The influence of economic growth, human development, poverty and unemployment on income distribution inequality: Study in the Province of the Bangka Belitung Islands in 2005–2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 413–422. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.413-422>
- Asyifa, R. N., & Chandriyanti, I. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 386–397. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.597>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/05/11/48b6466dcf14b562df9f17e2/indeks-pembangunan-manusia-2021.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Portal data APBD dan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Dougherty, S., Lorenzoni, L., Marino, A., & Murtin, F. (2022). The impact of decentralisation on the performance of health care systems: A non-linear relationship. *The European Journal of Health Economics*, 23(4), 705–715. <https://doi.org/10.1007/s10198-021-01390-1>
- Fitriya, N. M., & Witono, B. (2023). The influence of regional original income, general allocation funds, and special allocation funds on the human development index (Conduct research on Java Island regencies and cities during 2019 to 2021). *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(1), 176–181.
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2109279. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Jin, H., & Jakovljevic, M. (2023). Fiscal decentralization and the human development index: A cross-border empirical study. *Sustainability*, 15(11), 8784. <https://doi.org/10.3390/su15118784>
- Jin, Y., & Rider, M. (2022). Does fiscal decentralization promote economic growth? An empirical approach to the study of China and India. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 146–167. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2019-0174>
- Karampuan, A., Suharto, R. B., & Lestari, D. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 66–76. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.610>
- Khairi, H. (2021). Balance between delegation of authority and submission of regional revenue sources in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 431–443. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.431-443>
- Kurniasari, R., & Kurnia. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.

- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human development and decentralization: The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255–270. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.474>
- Nawawi, A., Jaya, W. K., Sumanto, M., & Pangaribowo, E. H. (2021). The impact of fiscal policy on welfare improvement in Indonesia: Study of impact of premium assistance beneficiaries on the national health insurance, physical special allocation fund for health sector, education sector, and village funds to human development index. *Populasi*, 29(2), 46–64. <https://doi.org/10.22146/jp.71691>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special allocation fund (DAK) for education sector: A development evaluation perspective of fiscal year 2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>
- Pradana, A. C. T., & Mun'im, A. (2022). The effect of local revenue and balancing funds on the economy of Bali Province in 2012–2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 439–451. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.439-451>
- Putri, R. Z., & Ribawati, E. (2025). Analisis pengaruh pajak daerah, belanja bantuan sosial, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2020–2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 25–48. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.363>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Wang, D., Zhang, E., & Liao, H. (2022). Does fiscal decentralization affect regional high-quality development by changing peoples' livelihood expenditure preferences: Provincial evidence from China. *Land*, 11(9), 1407. <https://doi.org/10.3390/land11091407>
- Xu, W., & Lin, J. (2022). Fiscal decentralization, public health expenditure and public health: Evidence from China. *Frontiers in Public Health*, 10, 773728. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.773728>